

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

DKI Jakarta merupakan salah satu kota yang berkembang pesat di Indonesia sehingga banyak dijumpai pembangunan khususnya bangunan tinggi yang sedang dilaksanakan. Pembangunan pada sektor konstruksi yang cukup signifikan terjadi pada pembangunan proyek bangunan tinggi. Dalam pembangunan tersebut memiliki peluang resiko kecelakaan kerja yang cukup besar, khususnya bagi pekerja yang berada dilapangan.

Menurut Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kerja, Kementrian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Maruli Apul Hasoloan mengatakan, dari data BPJS Ketenagakerjaan menggambarkan penurunan kecelakaan kerja dari 110.285 kasus di 16.082 perusahaan pada 2015 menjadi 101.367 kasus di 17.069 perusahaan di 2016. Ini berarti terjadi penurunan angka kecelakaan kerja sebesar 8%. Namun sayangnya, jumlah pekerja yang meninggal akibat kecelakaan kerja meningkat tajam dari 2015 ke 2016. Pada 2015, jumlah pekerja yang meninggal sebesar 530 orang. Sedangkan di 2016 sebesar 2.382 orang atau naik 34,94%. (liputan6 online edisi Kamis, 12/01/2017).

Setiap pelaksanaan proyek konstruksi tentunya mengharapkan agar pembangunan pada proyek dapat terlaksana baik dan sukses dengan memperhatikan faktor spesifikasi ketepatan waktu, mutu, efisiensi biaya, dan keselamatan dan kesehatan kerja yang terjamin. Namun pada kenyataannya

banyak proyek-proyek tersebut terhambat. Salah satu penyebabnya karena terjadinya kecelakaan kerja dilapangan yang tentu saja menjadi masalah bagi keberlangsungan suatu proyek pembangunan. Kerugian yang ditimbulkan tidak hanya kerugian materi yang cukup besar tetapi lebih dari itu bisa menimbulkan korban jiwa.

Keselamatan dan kesehatan kerja mengandung arti bagaimana seorang pekerja dapat bekerja secara maksimal dengan sehat, aman, dan nyaman serta mendapatkan perlindungan diri untuk menghindari resiko kecelakaan kerja yang dapat terjadi pada proyek tersebut.

Kecelakaan kerja yang terjadi pada proyek konstruksi banyak disebabkan oleh berbagai macam faktor, yaitu kurangnya komunikasi antara pekerja saat bekerja, pekerja yang kurang berpengalaman pada pekerjaan yang dilaksanakan, perilaku pekerja yang tidak berhati-hati saat bekerja, pekerja yang tidak memakai alat pelindung diri, pekerja yang tidak tahu cara memakai alat pelindung diri, peralatan kerja yang sudah tidak baik atau tidak layak pakai, penempatan peralatan kerja yang tidak pada tempatnya, kurangnya pengawasan dilapangan, dan sistem manajemen pada perusahaan jasa konstruksi yang kurang maksimal untuk dilaksanakan sepenuhnya.

Untuk mengurangi kecelakaan kerja tersebut maka setiap perusahaan jasa konstruksi harus dan wajib menerapkan serta melaksanakan Sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) yang efektif dan efisien guna memberikan perlindungan utama terhadap resiko-resiko yang akan terjadi sebelum melaksanakan proyek konstruksi.

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) merupakan sistem yang menerapkan program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dalam meminimalisir resiko-resiko kecelakaan dan hal-hal yang tidak diinginkan di proyek konstruksi dengan menggunakan peraturan-peraturan yang berlaku untuk mencapai hasil yang efektif.

Dalam hal ini pemerintah sebagai penyelenggara negara mempunyai kewajiban perlindungan kepada tenaga kerja. Hal ini direalisasikan pemerintah dengan dikeluarkannya berbagai macam peraturan-peraturan. Peraturan-peraturan tersebut salah satunya PP No. 50 Tahun 2012 yang merupakan kebijakan nasional tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) yang dijadikan pedoman perusahaan dalam menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).

Pada pembangunan proyek bangunan tinggi memiliki resiko bahaya ketinggian karena semakin tinggi akan semakin bahaya. Sehingga tuntutan *safety* akan semakin tinggi jika ketinggian bangunan bertambah. Hal ini sangat penting karena *safety* pada bangunan tinggi merupakan tantangan bagi perusahaan jasa konstruksi bagaimana untuk tetap *safety* dalam melakukan setiap pekerjaan yang memiliki resiko tinggi kecelakaan.

Berdasarkan uraian diatas, penulis ingin meneliti tingkat kepentingan dan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) pada proyek bangunan tinggi di DKI Jakarta berdasarkan pedoman PP No. 50 Tahun 2012.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah yang hendak diteliti, yaitu:

1. Bagaimana penerapan pada Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) pada proyek bangunan tinggi di wilayah DKI Jakarta berdasarkan pedoman PP No. 50 Tahun 2012.
2. Bagaimana tingkat kepentingan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) pada proyek bangunan tinggi di wilayah DKI Jakarta berdasarkan pedoman PP No. 50 Tahun 2012.
3. Bagaimana kesesuaian antara kepentingan dan penerapan dalam Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) pada proyek bangunan tinggi di DKI Jakarta.

1.3. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini terdapat beberapa batasan dengan tujuan agar penelitian ini lebih terfokus. Batasan-batasan masalah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penelitian dilakukan pada proyek perusahaan bidang konstruksi
2. Tempat penelitian pada proyek bangunan tinggi di wilayah DKI Jakarta
3. Proyek bangunan tinggi, proyek resiko tinggi yang pengerjaannya sangat membahayakan pekerja proyek dan lingkungan sekitar proyek
4. Penelitian mengenai penerapan Sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) pada proyek bangunan tinggi

5. Pengambilan data dengan penyebaran kuesioner yang dibagikan kepada *project manager, site manager, safety officer, quality control*, para pelaksana, dan para mandor

1.4. Keaslian Penelitian

Berdasarkan data tugas akhir di Universitas Atma Jaya Yogyakarta, penyusun tidak menemukan Tugas Akhir yang khususnya mengamati tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) pada proyek konstruksi bangunan tinggi yang dilakukan di wilayah DKI Jakarta dengan judul **Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pada Proyek Bangunan Tinggi di DKI Jakarta** yang belum pernah dilakukan sebelumnya.

1.5. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) pada proyek bangunan tinggi di wilayah DKI Jakarta berdasarkan pedoman PP No. 50 Tahun 2012
2. Mengetahui tingkat kepentingan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) pada proyek bangunan tinggi di wilayah DKI Jakarta berdasarkan pedoman PP No. 50 Tahun 2012

3. Mengetahui kesesuaian antara kepentingan dan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) pada proyek bangunan tinggi di DKI Jakarta

1.6. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat diantaranya:

1. Untuk penulis: dengan penelitian ini penulis sebagai calon sarjana teknik sipil akan mendapatkan pengetahuan mengenai penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) pada proyek konstruksi terutama pada konstruksi bangunan tinggi.
2. Untuk perusahaan jasa konstruksi: penelitian ini dapat memberikan pedoman untuk membantu perusahaan jasa konstruksi dalam peningkatan penerapan dan pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) pada proyek bangunan tinggi, sehingga dalam pelaksanaan proyek berjalan dengan lancar dan memenuhi kewajibannya untuk perlindungan keselamatan dan kesehatan para pekerja dan lingkungan konstruksi.
3. Memberi informasi pada masyarakat mengenai penerapan dari Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada proyek konstruksi bangunan tinggi yang memiliki tingkat resiko yang tinggi.